

Mimpi Buruk Plagiarisme

OLEH: IWAN SULISTYO

Alumnus Fisip-UI, Kandidat MA bidang Hubungan Internasional UGM



OPINI Willson Gustiawan dalam *Haluan* (20/10) lalu, *Plagiarisme, "Dosa Besar" Penulis Ilmiah*, menarik untuk didiskusikan. Saya sepakat dengan paparan itu. Untuk mendukung opininya, kali ini saya coba melihatnya dengan perspektif yang agak makro.

Persoalan plagiarisme penting karena mengandung unsur merugikan dan, pada takaran tertentu, cukup sensitif. Tindakan plagiat dipandang merugikan karena berwujud pencurian atas ide/gagasan orang lain.

Tali-temali persoalan plagiarisme tidak hanya menyentuh aspek teknis-penulisan suatu karya ilmiah. Lebih dari itu, ia juga melibatkan dimensi etika dan moral.

Karenanya, saya sangat menyarankan agar di semester pertama penyelenggaraan pendidikan di semua perguruan tinggi di Indonesia, apapun tingkat stratanya, para mahasiswa baru (maba) harus dibekali 'workshop singkat' penulisan ilmiah, terutama cara mengutip dan memparafrase.

Di semester awal S-1, mungkin bekal *workshop* tidak terlalu mendalam mengingat, jelang penulisan skripsi, *toh* pelatihan itu umumnya juga akan diberikan. Namun, paling tidak, karena kerangka-pikir para maba S-1 masih kental nuansa SMA, mengenalkan cara berpikir ilmiah yang sarat kehati-hatian di semester awal, juga tidak ada salahnya. Bagi mahasiswa jenjang S-2 dan S-3 yang sudah cukup mapan dan berpengalaman, barangkali persoalan etika penulisan ilmiah ini relatif dipahami, kendati tetap penting dan harus senantiasa dijunjung tinggi. Keharusan 'mengutip sum-

ber' berarti menghargai 'kepala' manusia sebelumnya. Ia juga bermakna sikap 'sadar diri' akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Lebih makro, hal itu wujud dari hasrat kehati-hatian dalam menulis secara ilmiah.

Yang jelas, nilai-nilai *academic ethics* (etika akademik) harus di tanamkan di awal masa studi di kampus. Harapannya, para lulusan perguruan tinggi yang kelak akan mengisi sektor swasta, pemerintahan/birokrasi, dan di bidang pendidikan benar-benar sadar untuk tidak akan 'mencuri', mencuri dalam pengertian yang luas.

Pilar-pilar etika akademik harus dipancang-tularkan kepada para maba lewat proses belajar. Di tingkat S-1, para senior sebenarnya punya peran positif jika 'intervensi' yang dilakukan berwujud pengenalan etika dan norma ilmiah, ketimbang menggelar serangkaian kegiatan yang kurang produktif di kampus.

Masa-masa ini sangat berharga bila diisi dengan lebih banyak diskusi tentang pemikiran, kebijakan, termasuk mengasah daya kritis-analitis, dan kemampuan merangkai argumen, memparafrase, serta keterampilan menelaah data dan konten suatu bacaan (hermeneutika).

Jika menulis adalah seni, maka beruntunglah para mahasiswa yang aktif di kegiatan penulisan, baik secara pribadi ataupun kolektif, tanpa abai akan studinya.

Harapannya, sikap kehati-hatian ini bisa tumbuh mekar dan bersemi di awal masa belajar di kampus dan kelak dapat dilanjutkan di masa depan.

Para maba harus diberi pemahaman bahwa setiap rumpun dan cabang disiplin ilmu adalah potongan kecil *puzzle* dari gambaran semesta ciptaan Tuhan yang serba luas dan serba kompleks. Karenanya, secara ideal, semakin banyak seorang akademisi membaca pelbagai sumber, ia kian sadar bahwa betapa luasnya ilmu pengetahuan itu.

Untuk konteks maba S-1 di perguruan tinggi, relatif sulit mengidentifikasi, apakah percikan suatu 'gagasan/pemikiran baru' mereka adalah murni berasal dari diri mereka sendiri, ataukah 'ilham' yang turun dari langit, dari perbincangan dengan para dosen/kolega di ruang kelas, & atau dari pelbagai sumber bacaan yang digemarinya.

Lebih luas lagi, tidak ada jaminan, sebuah gagasan yang dikemukakan seseorang, entah berwujud ucapan ataupun tulisan, murni berasal dari dirinya sendiri. Sejarah akan senantiasa diisi-ulang oleh sejumlah manusia yang mengabdikan dirinya untuk 'berpikir' dan kemudian 'menuliskan'-nya. Lantas, generasi sesudahnya akan 'membaca' dan 'memaknai' pelbagai karya-karya mereka.

Di situ lah terjadi dialektika, suatu 'perdebatan abadi' di dalam kehidupan akademik, apapun rumpun dan cabang disiplin

keilmuannya. Temuan baru niscaya membantah atau mendukung dan menyempurnakan temuan terdahulu.

Bagi dosen yang cermat dalam etika penulisan, tidak sulit untuk melacak apakah *paper* atau makalah yang dibuat/dipresentasikan di ruang kelas benar-benar 'racikan' si mahasiswa sendiri. Sebab, kemajuan pesat teknologi (internet) memungkinkan untuk penelusuran dengan cepat. Alhasil, bagi generasi lintas-usia dan lintas-strata, penting dan bahkan wajib untuk membaca sebanyak mungkin literatur.

Begitu banyak buku atau hasil riset dalam bentuk digital (*e-book*) yang sebagian tersedia gratis di internet. Sejumlah *search engine* juga dapat digunakan untuk menelusuri pelbagai *e-journal* hasil riset.

Untuk konteks nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), misalnya, punya portal <http://garuda.dikti.go.id/>. Beberapa perpustakaan di sejumlah perguruan tinggi nasional juga memiliki portal (*digital library*) yang bisa diakses oleh pihak luar.

Ketersediaan semua itu memungkinkan mahasiswa untuk peroleh bahan dari sumber/penulis pertama, bukan paparan yang bersifat repetisi dari penulis kedua atau bahkan ketiga. Dengan begitu, ada 'rasa puas' dan 'rasa tenang' dalam menulis/meneliti karena dapat melakukan pemeriksaan (*cross-check*) atas gagasan ataupun data dari penulis utama dengan teliti.

Maka, tantangan besar Kementerian Dikbud yang kini tengah menata-ulang sistemannya adalah bagaimana 'membudayakan membaca' dan 'membaca kebudayaan'.

Meminjam pemikiran Mendikbud era Presiden

Habibie, bahwa ada 4 pasang kompetensi yang mendukung pendidikan dan kebudayaan: membaca & menulis, mendengar & menutur, menghitung & mengamati, serta mengkhayal & menghayati.

Lazimnya, tiap kampus di Tanah Air berlangganan *e-journal* internasional yang memungkinkan para mahasiswa membaca dan memperoleh pelbagai temuan riset yang pernah dilakukan. Ini sangat penting dan membantu. Bagi kampus yang mengalami kendala, Kementerian Dikbud seyogyanya memfasilitasi dari segi pendanaan.

Jadi, kini sangat gampang untuk menelusuri dan membandingkan pelbagai karya tulis, isu, dan kajian tertentu yang spesifik.

Masalah penulisan, oleh sebagian kalangan, mungkin tidak begitu mendapat perhatian. Akan tetapi, ternyata, persoalan ini sangat melekat di dalam *day to day* kehidupan akademik.

Pada akhirnya, mimpi buruk seorang akademisi di semua penjuru dunia adalah manakala suatu hari kelak, karya tulisnya digugat oleh komunitas akademik dan ditengarai sebagai jiplakan karya orang lain.

Akan tetapi, mimpi buruk ini niscaya dapat ditangkal dengan kecermatan yang tinggi dalam berpikir, bertindak, membaca, dan berinovasi.

Bagaimanapun, sikap 'cermat-jawab' terhadap ilmu pengetahuan dan perilaku 'kritis-hormat' akan buah-pikir para penulis terdahulu, adalah tameng yang handal.

Dengan begitu, 'mimpi buruk' plagiarisme dapat dibalik menjadi 'mimpi indah' inovasi dan percikan pemikiran-baru guna menopang peradaban dan kesejahteraan bangsa. ■

Haluan Kita

Rasa Keadilan dalam Kasus-kasus Korupsi

DALAM beberapa kali pernyataan, disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri bahwa lebih separuh Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi di Indonesia tersangkut kasus pidana korupsi. Setidak-tidaknya yang dimaksudkan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi itu adalah mereka yang sedang diadili di Pengadilan Negeri setempat. Jadi bukan berarti tersangkut itu akhirnya benar-benar bersalah. Hanya saja tersangkut kasus korupsi tapi kemudian pengadilan menyatakan mereka tidak bersalah.

Tetapi dalam praktiknya, semangat pemberantasan korupsi itu seolah-olah adalah semangat untuk menjebloskan orang ke dalam penjara, bukan pada bagaimana agar orang tidak terjenuh kepada perbuatan yang mengakibatkan seorang kepala daerah masuk penjara.

Nah dalam urusan kasus-kasus yang menyeret Kepala Daerah ke pengadilan itu, sampailah kepada babak akhir: Kepala Daerahnya dicopot dan diganti oleh Wakil Kepala Daerah atau dilakukan pemilihan ulang. Celakanya, ketika kasus itu sudah sampai ke titik paling ujung dari perjuangan mencari keadilan di negeri ini yakni di Mahkamah Agung, sang Kepala Daerah dinyatakan bebas. Tapi waktu sudah berjalan, jabatan yang dia tinggalkan sudah digantikan oleh orang lain.

Hari Jumat lalu di Nusa Dua Bali, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, bangsa ini perlu adil bagi kepala daerah yang divonis bebas oleh pengadilan, terutama untuk masa jabatan yang hilang akibat proses hukum yang terlalu lama.

Dalam undang-undang, apabila seorang kepala daerah yang terjerat hukum kemudian divonis bebas, maka dia harus diaktifkan kembali. Bila dia menjalani proses hukum sebagai terdakwa pada awal tahun kedua dan baru dapat vonis bebas setelah banding, kasasi, dan kemudian dilanjutkan pula PK oleh Jaksa sehingga memakan waktu hingga tiga tahun, tentu saat aktif kembali ia hanya akan menjalankan sisa jabatan selama setahun saja.

Nah, bagaimana masa jabatan yang hilang selama dua tahun itu. Apakah masa jabatannya bisa ditambah atau hanya menjalani yang setahun saja? Sungguh tak adil rasanya. Ini menjadi sorotan oleh Mendagri bersama sejumlah Kepala Daerah yang berkumpul dalam organisasi Asosiasi Kepala Daerah.

Sesungguhnya perlu dirumuskan dalam UU 32/2004 dan undang-undang terkait lainnya tentang masa jabatan yang hilang tersebut. Kalau dibiarkan begitu saja sebagai sebuah risiko, negara ini tak adil juga buat mereka yang tak bersalah.

Kemendagri, sebagaimana diakui oleh menterinya, mengaku agak tersandera oleh banyak celah hukum yang diterjemahkan dengan berbagai sudut pandang. Seorang bupati atau walikota, misalnya, yang sudah divonis bebas demi hukum, seandainya kan tidak boleh diproses lagi. Namun ada celah yang membuat jaksa bisa melakukan PK. Akibatnya, pihak Kementerian Dalam Negeri belum bisa mengaktifkan yang bersangkutan.

Kalau ini tidak cepat-cepat diselesaikan bukan tak mungkin orang bukannya takut korupsi, tapi justru takut jadi Kepala Daerah, sebab bisa-bisa kena kait kasus korupsi tapi sebenarnya tidak bisa dihukum.

Hal lain, jika ini dibiarkan terus menerus, bukan tak mungkin negeri ini justru menjadi aneh, para Kepala Daerah jadi biang korupsi. Hasil survei Pada 2010 oleh Hongkong-based Political Economic Risk Consultancy Ltd. menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup setelah Kamboja di kawasan Asia Pasifik. Dari hulu hingga hilir korupsi kian mengurita, seakan takkan ada habisnya.

Dengan kondisi seperti sekarang ini maka akan sulit bagi negara Berkembang seperti Indonesia untuk bangkit jika tak ada komitmen kuat untuk memperbaiki birokrasi dan kinerja institusi publik. Komitmen kuat tersebut harus didukung semua pihak: eksekutif, legislatif dan yudikatif. Namun memperbaiki institusi publik dan birokrasi bukan perkara yang mudah, dibutuhkan integritas yang tinggi bagi para penegak hukum.

Lambatnya penanganan kasus-kasus besar mencerminkan banyaknya kendala yang dihadapi oleh para penegak hukum. Kita berharap negara dapat segera keluar dari korupsi yang terus membelenggunya, sehingga harapan masyarakat mendapat keadilan dan kesejahteraan cepat terpenuhi. Semoga ke depan, siapa pun pemimpinnya bisa menyejahterakan rakyat dan tidak korupsi bisa diminimalisir. Dan yang lebih penting lagi bagaimana rasa keadilan diberikan kepada Kepala Daerah sebagaimana sudah ditekankan di atas, mereka yang sudah terjerat menjalani proses hukum dan jadi pesakitan tiba-tiba dibebaskan. Tapi hak-hak mereka hilang begitu saja. ***

haluanjisme

■ Data di Polresta, kasus pencurian tertinggi di Kota Padang

■ Ganda...

SEBUAH TINJAUAN KRITIS

RSBI: Rintisan Sekolah Berbahasa Inggris?

OLEH: MAYA LESTARI GF.

Ketua Komunitas Jurnalistik Imam Bonjol



Menarik mencermati tajuk rencana Harian *Haluan* edisi Rabu, 19 Oktober 2011. Disebutkan sekolah RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) memiliki sejumlah permasalahan, seperti fasilitas, kualitas dan kuantitas guru. Kualitas yang dimaksud di sini bukan hanya mencakup penguasaan terhadap materi ajar tapi juga kemampuan bahasa Inggris.

Ini membuat saya teringat lagi sebuah pertanyaan yang kerap ditemukan dalam perbincangan mengenai RSBI. Di sekolah RSBI guru matematika yang belajar bahasa Inggris atau guru bahasa Inggris yang belajar matematika?

Pertanyaan ini hadir karena bahasa pengantar RSBI adalah bahasa Inggris, sementara kita semua sama mahfum, jarang sekali guru yang bisa berbahasa Inggris dengan sangat fasih, baik aktif maupun pasif. Jadi, berharap sebuah sekolah bisa menjadi RSBI lalu akhirnya SBI dengan standar penguasaan bahasa Inggris, benar-benar sesuatu yang sulit, kecuali bila sekolah pendidikan guru menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar kuliah.

Bisalah diharapkan, sematam kuliah para calon guru ini mampu mengajarkan Matematika, IPA dan pelajaran lainnya dalam bahasa Inggris yang fasih?

Namun, ada satu pertanyaan di sini. Apa relevansi antara menjadikan bahasa Inggris

sebagai bahasa pengantar pendidikan dengan kualitas pembelajaran? Bahasa sebagai alat komunikasi antara guru dengan murid, merupakan medium untuk mengantarkan ilmu pengetahuan ke hati dan kepala siswa. Sebagai medium, tentu yang digunakan adalah bahasa yang dipahami. Lalu mengapa harus memaksakan sebuah bahasa yang tidak dikenal baik oleh siswa? Bukankah lebih baik siswa diajar dengan bahasa ibunya atau bahasa yang biasa ia pakai dalam berinteraksi dengan masyarakatnya?

Lembaga Unesco sendiri sebenarnya sudah sejak jauh-jauh hari menganjurkan agar negara-negara anggota menggunakan bahasa ibu atau bahasa yang biasa dipakai siswa sehari-hari sebagai bahasa pengantar pendidikan. Anjuran yang dikeluarkan pada tahun 1951 itu diulang lagi pada bulan November 2010 dalam Konferensi Bahasa, Pendidikan dan Tujuan Pembangunan Milenium di Bangkok, Thailand. Dalam konferensi itu disebutkan, bahwa pendidikan yang menggunakan bahasa ibu dapat meningkatkan penerimaan materi ajar oleh siswa. Ini akan berujung pada peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas hidup manusia.

Carole Benson, Ph.D, peneliti dari Universitas Stockholm dalam papernya berjudul *The Importance of Mother-*

Tongue Based Schooling for Educational Quality menyatakan menyuruh siswa belajar bukan dengan bahasa yang mereka pahami betul, sama saja dengan menobatkan anak-anak ke air tanpa mengajar mereka bagaimana cara berenang. Bahasa ibu adalah instrumen penting dalam pendidikan, karena itu tidak bisa ditinggalkan. Anak-anak yang memahami pelajaran dalam bahasa yang mereka kenal baik, nantinya akan mudah mentransfer ilmunya itu ke bahasa kedua.

Menurut Benson, bahasa kedua (dalam kasus ini adalah bahasa Inggris) baru bisa digunakan sebagai bahasa pengantar bila siswa telah memahami bahasa tersebut sebaik-baiknya. Pun antara guru dan siswa telah bisa berkomunikasi dalam bahasa tersebut secara natural. Jika hal itu belum tercapai, maka pembelajaran yang dilakukan dalam bahasa kedua sebaiknya ditunda dulu. Hal ini sudah disadari oleh banyak negara di dunia. Di

antaranya Jerman yang membuat kebijakan penggunaan bahasa ibu di sekolah-sekolah, serta China dan Thailand. Kebijakan ini berhasil meningkatkan kualitas pendidikan di negara-negara tersebut.

Dalam Konferensi Bahasa, Pendidikan dan Tujuan Pembangunan Milenium yang diadakan UNESCO di Bangkok, Thailand pada November 2010 lalu, tercetus kecamasan dari sejumlah pakar pendidikan. Diantaranya Helen Pincock, penasihat pendidikan dari lembaga Save the Children, Inggris. Ia menyebutkan dilema yang akan dihadapi siswa bila sekolah menjadikan bahasa yang tak dipahami sebagai bahasa pengantar. "Di satu sisi anak-anak tidak fasih berbahasa Inggris karena tidak dipakai sehari-hari. Di sisi lain penggunaan bahasa ibu juga menjadi tidak lancar karena di sekolah mulai ditinggalkan." (Harian Kompas, Rabu, 10 November 2010).

Bukan hanya itu, menurut Catherine Young Direktur SIL International Lead Asia, penggunaan bahasa asing juga akan melemahkan minat anak bersekolah. Kekawatirannya ini agaknya menemui kenyataan di Benua Afrika, dimana menurut Carole Benson penggunaan bahasa asing di sekolah telah membuat hampir 50 persen anak *drop out* dari sekolahnya, sehingga Unesco akhirnya membuat program *Mother-Tongue Based School*. Sebuah program yang mendorong pemerintah-pemerintah Afrika untuk membuat kebi-

jakan menggunakan bahasa ibu di sekolah-sekolah.

Kembali ke Indonesia. Selama ini kita berupaya menjadikan siswa-siswa kita memiliki kompetensi setara dengan siswa-siswa dari negara maju. RSBI yang akhirnya menjadi SBI (Sekolah Bertaraf Internasional) dibuat untuk mencapai harapan itu. Namun bila kita melihat posisi Indonesia yang terus menurun di Indeks Pembangunan Pendidikan yang dikeluarkan UNDP, dari peringkat 65 tahun 2010 ke peringkat 69 tahun 2011 ini (Kompas.com, 2 Maret 2011) tentu kita patut mengkritisi program RSBI dan SBI ini. Memang tujuan program ini baik, tapi bila cara mencapainya tidak tepat, maka tujuan tidak akan tercapai. Perkataan pakar pendidikan anak Helen Pincock berikut patut kita cermati. Menuntun bahasa asing sebagai bahasa pengantar (pendidikan) tidak bisa dijadikan ukuran mutu suatu sekolah.

Yang penting benahi metode pengajaran, cara belajar siswa, dan cara guru mengajar. Buat anak nyaman belajar di sekolah, apakah itu dengan bahasa lokal, nasional atau asing. Sebagai penutup, tak ada salahnya kutipan pidato pembukaan Abhisit Vejjajiva pada konferensi yang diselenggarakan Unesco di Bangkok tahun 2010 itu (saat ia masih menjabat Perdana Menteri Thailand), menjadi remangan kita.

"Ilu pengetahuan apapun akan lebih cepat dimengerti siswa bila disampaikan dalam bahasa mereka sendiri." ■

Mimpi Buruk Plagiarisme

OLEH: IWAN SULISTYO

Alumnus Fisip-U, Kandidat MA bidang Hubungan Internasional UGM



OPINI Willson Gustiawan dalam *Haluan* (20/10) lalu, *Plagiarisme, "Dosa Besar" Penulis Ilmiah*, menarik untuk didiskusikan. Saya sepakat dengan paparan itu. Untuk mendukung opininya, kali ini saya coba melihatnya dengan perspektif yang agak makro.

Persoalan plagiarisme penting karena mengandung unsur merugikan dan, pada takaran tertentu, cukup sensitif. Tindakan plagiat dipandang merugikan karena berwujud pencurian atas ide/gagasan orang lain.

Tali-tamali persoalan plagiarisme tidak hanya menyetuh aspek teknis-penulisan

ber' berarti menghargai 'kepala' manusia sebelumnya. Ia juga bermakna sikap 'sadar diri' akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Lebih makro, hal itu wujud dari hasrat kehati-hatian dalam menulis secara ilmiah.

Yang jelas, nilai-nilai *academic ethics* (etika akademik) harus di tanamkan di awal masa studi di kampus. Harapannya, para lulusan perguruan tinggi yang kelak akan mengisi sektor swasta, pemerintahan/birokrasi, dan di bidang pendidikan benar-benar sadar untuk tidak akan 'mencuri', mencuri dalam pengertian yang luas.

keilmuannya. Temuan baru niscaya membantah atau mendukung dan menyempurnakan temuan terdahulu.

Bagi dosen yang cermat dalam etika penulisan, tidak sulit untuk melacak apakah *paper* atau makalah yang dibuat/dipresentasikan di ruang kelas benar-benar 'racikan' si mahasiswa sendiri. Sebab, kemajuan pesat teknologi (internet) memungkinkan untuk penelusuran dengan cepat. Alhasil, bagi generasi lintas-usia dan lintas-strata, penting dan bahkan wajib untuk membaca sebanyak mungkin literatur.

Begitu banyak buku atau hasil riset dalam bentuk digital (*e-book*) yang sebagian tersedia gratis di internet. Sejumlah *search engine* juga dapat digunakan untuk menelusuri pelbagai *e-journal*

Habibie, bahwa ada 4 pasang kompetensi yang mendukung pendidikan dan kebudayaan: membaca & menulis, mendengar & menutur, menghitung & mengamati, serta mengkhayal & menghayati.

Lazimnya, tiap kampus di Tanah Air berlangganan *e-journal* internasional yang memungkinkan para mahasiswa membaca dan memperoleh pelbagai temuan riset yang pernah dilakukan. Ini sangat penting dan membantu. Bagi kampus yang mengalami kendala, Kementerian Dikbud seyogyanya memfasilitasi dari segi pendanaan.

Jadi, kini sangat gampang untuk menelusuri dan membandingkan pelbagai karya tulis, isu, dan kajian tertentu yang spesifik.

Masalah penulisan, oleh